

**FUNGSI KOMUNIKASI POLITIK DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT MADANI:
STUDI KASUS DI DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (PDI-P) KOTA KUPANG**

Kristin Juliana Ara Riwu; Andy Nabu Sogen; dan Lenny M. Tamunu

Universitas Nusa Cendana Kupang

Email: riwukristin@yahoo.com

ABSTRAK:

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan fungsi komunikasi politik yang dijalankan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam membangun masyarakat madani, untuk mendeskripsikan bagaimana gambaran masyarakat madani, menganalisis dan menjelaskan tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh PDI-P dalam menjalankan fungsi komunikasi politik, khususnya dalam membangun masyarakat madani di Kota Kupang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dari ketua Fraksi PDI-P, ketua DPC PDI-P, anggota DPC PDI-P, serta masyarakat Kota Kupang melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi komunikasi politik di DPC PDI-P belum memaksimalkan pendidikan politik melalui sosialisasi politik yang efektif bagi masyarakat, serta partai mengalami hambatan dalam melaksanakan komunikasi politik adalah pendanaan, citra partai melalui media massa, dan budaya instan yang berkembang, sedangkan upaya yang dilakukan DPC PDI-P adalah membangun dan menarik iuran dari anggota partai serta menciptakan kebersamaan bersama masyarakat, melaksanakan sosialisasi politik secara rutin dan terus menerus yang dapat memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.

Kata kunci: Komunikasi politik, Masyarakat madani, DPC PDIP

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze and explain the function of political communication which is run by Indonesian Democratic party in Struggle (PDI-P) in building civil society to describe how the image of civil society, to analyze and explain challenges and obstacles faced by Indonesian democratic party in struggle (PDI-P) in carrying out functions of political democracy in building a civil society in Kupang city. The method used in this research is descriptive qualitative. Data collected from Indonesian democratic party in struggle PDI-P, Chairman of the DPC PDI-P members, as well as the city of Kupang community through interview, observation and documentation. The results showed that the performance of the functions of political communication PDI-P has not maximize political education through political communication is funding, the party's image through mass media, and instant culture is growing while efforts DPC PDI-P do is build that collect fees from party members as well as to promote unity with people of the implementation of political socialization regularly and continuously to provide political education for the public good.

Keywords: Political communication, Civil society, DPC PDI-P.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar (Harjono, 2008). Ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini membentuk sistem kedaulatan rakyat yang berada pada rakyat dengan pelaksanaannya didasarkan pada amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi harus menjalankan amanah rakyat sebagaimana yang tertuang

dalam konstitusi negara Indonesia dan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan ditangan rakyat. Oleh karena itu, setiap lima tahun sekali Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) dalam rangka memilih wakil-wakil rakyat yang akan membawa suara rakyat dalam lembaga perwakilan. "Pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat" (Trichayono, 2009: 6).

Peserta dalam penyelenggaraan pemilu berasal dari partai politik yang berperan sebagai wadah penyalur aspirasi rakyat. Sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich (1967) "Partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut dan mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepadaanggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil secara materiil" Friedrich (dikutip Budiardjo, 2013: 404). Adanya partai politik membuat rakyat terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan negara, secara umum partai politik dikatakan memiliki tujuan dan cita-cita yang sama untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Pengertian partai politik dalam Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) adalah: "Organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum".

Selain itu, "Partai politik sebagai kelompok anggota yang terorganisasikan secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilu guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun" (Surbakti, 2010:116). Terbentuknya partai politik yang berakar kuat dari masyarakat, maka yang diharapkan yaitu partai politik mampu membentuk pemerintahan yang mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat. Namun kenyataannya partai lebih mengutamakan kepentingan birokrasi dan kerap mengabaikan kepentingan massa pemilih yang membesarkan partainya tersebut.

Salah satu fungsi dari partai politik yaitu sebagai sarana komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan proses penyampaian informasi-informasi yang bermuatan politik. Dalam menjalankan fungsi partai politik harus mampu menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi dari masyarakat, dengan melakukan penggabungan kepentingan masyarakat (*interest aggregation*) dan merumuskan kepentingan tersebut dalam bentuk yang teratur (*interest articulation*) untuk dijadikan suatu usulan kebijaksanaan yang diajukan kepada pemerintah agar suatu usulan kebijakan publik, terjadi arus informasi yang berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat.

Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan bahwa: "Pelaksanaan komunikasi politik dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam komunikasi politik, yaitu: sumber, pesan, saluran, umpan balik dan *audiens* atau pendengar" (Rush dan Allthof, 2008). Pendidikan politik melalui komunikasi politik yang intensif dan efektif, selain mencerdaskan dan menyadarkan rakyat tentang hak dan kewajibannya juga sekaligus akan mengembalikan citra dirinya.

Pelaksanaan komunikasi politik tidak berjalan dengan baik hal ini dikarenakan kualitas anggota partai yang masih rendah. Ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih (2014) dengan judul "Pelaksanaan Fungsi Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Studi Pemilihan Walikota Bandung Tahun 2013)". Hasil penelitian membuktikan bahwa pelaksanaan fungsi komunikasi di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Bandung pada pemilihan Walikota Bandung terdiri dari unsur-unsur yang membentuknya, yaitu: komunikator, komunikan, pesan, saluran, dan *feed back*. Partai PDI-P sebagai partai politik yang tergolong besar, dimana didukung oleh kader

partai yang cukup banyak, sedangkan faktor penghambatnya adalah anggota partai yang kualitasnya masih rendah.

Kondisi sosial politik yang terjadi saat ini adanya ruang yang melahirkan kondisi politik, tanpa melahirkan partisipasi publik. Kandidat tidak bekerja berdasarkan visi dan misi program nyata, tetapi lebih mengedepankan kegiatan yang mendatangkan massa, disatu sisi massa akan datang bila diberi uang/sembako. Hal tersebut sejalan dengan pendapat salah satu pengamat sosial politik dari Universitas Muhammadiyah Kota Kupang tentang masyarakat madani di Kota Kupang yakni "Partisipasi masyarakat tinggi bukan karena kesadaran politik, tetapi karena uang" (Atang dalam Surat Kabar Harian Pos Kupang tanggal 28 Desember 2014).

Membangun masyarakat madani tidaklah mudah, komponen yang terpenting yang merupakan prasyarat yaitu otonomi, akses masyarakat terhadap lembaga negara, arena publik yang bersifat otonom, dan arena publik tersebut terbuka bagi setiap masyarakat. Disinilah dibutuhkan peranan partai politik merupakan salah satu pilar dalam penegakan masyarakat madani. Kehadiran masyarakat madani akan sebuah kenyataan, akan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban secara independen. Hak yang dimaksud adalah suara rakyat, jika masyarakat menyadari akan hak dan kewajibannya, maka dirinya pun tidak ingin di mobilisasi, menyerah atau dipatronase secara politik. Dalam mengisi ruang publik hal yang dapat diwujudkan adalah bentuk partisipasi politik yang mandiri dan proses pembentukan kebijaksanaan publik sehingga negara tidak menentukan sendiri segala sesuatu yang menyangkut proses penyelenggaraan negara. Jadi masyarakat yang tingkat otonomi relatif kuat itulah yang menjamin berkembangnya demokrasi atau dengan kata lain berkembangnya karena masyarakat madani merupakan syarat mutlak bagi perkembangan demokrasi.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya Kota Kupang menjadi contoh toleransi di Indonesia. Kemajemukan masyarakat Kota Kupang tidak membuat perbedaan yang memecah belah persatuan dan kesatuan sehingga Kota Kupang dijuluki Kota Kasih. Pendapat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTT, bahwa "Warga Kota Kupang yang mayoritas penduduknya beragama Kristen memberikan ruang amandan damai bagi seluruh umat muslim di Daerah itu untuk melaksanakan seluruh rangkaian ibadah, puasa hingga Idul Fitri. Prinsip toleransi yang sudah melekat dalam masyarakat Kota Kupang menjadi salah satu prasyarat dalam membangun masyarakat madani. Tetapi menurunnya kesadaran politik dapat menghambat pertumbuhan bagi keberlangsungan demokrasi di Kota Kupang.

Fenomena yang terjadi saat ini di Kota Kupang adalah masyarakat yang tidak memberikan hak suara pada pemilihan kepala daerah Kota Kupang tahun 2017, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang bahwa partisipasi pemilih hanya mencapai 70,1%, dengan demikian Kota Kupang tidak mampu memenuhi target nasional yang telah ditetapkan sebesar 75,5% dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Tingginya Angka Golongan putih (GOLPUT) atau tidak memilih yang mencapai hampir 30% dalam pemilihan kepala daerah (PILADA), disebabkan oleh salah satu faktor, yaitu minimnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan tidak maksimalnya pelaksanaan fungsi komunikasi politik. Hal yang terpenting dalam proses pembentukan masyarakat madani adalah pemerintahan yang demokratis. Dengan demikian maka partai politik dan pasangan calon (PASLON) harus bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik melalui komunikasi politik yang dilakukan secara maksimal, agar masyarakat memiliki kecerdasan dan kesadaran bagaimana melaksanakan hak dan kewajibannya dalam membangun demokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif, yang mengarah pada penelitian studi kasus. Menurut Salim (2001:93) bahwa studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan atau menginterpretasi suatu kasus (*case*) dalam konteksnya secara natural tanpa adanya suatu intervensi dari pihak lain. Penelitian ini menggunakan sumber data secara *purposive*, yakni menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul (Moleong, 2007). Data utama merupakan hasil kombinatif kegiatan indera peneliti dalam melihat, mendengar dan bertanya seputar komunikasi politik yang dilaksanakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Data utama akan diperoleh dari pengalaman dan observasi peneliti di Lokasi penelitian yang disebut data primer.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah simbolik model interaktif. Menurut Miles dan Huberman (2007) model ini memiliki tiga komponen yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*)
Proses ini merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data yang muncul dalam catatan-catatan terdahulu di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian.
2. Penyajian data (*data display*)
Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilaksanakan agar penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan atau terus melangkah melakukan analisis penyajian sebagai suatu yang berguna.
3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)
Setelah peneliti melalui proses reduksi dan penyajian data, selanjutnya peneliti menarik kesimpulan dari proses yang sebelumnya. Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka, sehingga yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rincian mengakar dengan kokoh

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

1. Fungsi komunikasi politik yang dijalankan oleh DPC PDIP dalam membangun masyarakat madani.

a. Memberikan informasi politik kepada masyarakat.

Hasil wawancara peneliti bahwa DPC PDI-P melaksanakan komunikasi politik secara tatap muka dalam bentuk sosialisasi politik bersama masyarakat dan secara tidak langsung melalui media politik berupa media massa, baliho, spanduk, brosur, selebaran. Wawancara peneliti dengan R1 (53 tahun) pada hari Kamis, 27- April 2017 pukul 09.00 Wita di Ruang Fraksi PDI-P mengatakan bahwa:

“Kami melaksanakan komunikasi politik secara langsung maupun tidak langsung, salah satunya adalah sosialisasi politik, dimana orientasi dari sosialisasi itu adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar turut berpartisipasi dalam pemilihan dan secara tidak langsung disampaikan melalui media agar tersentuh oleh semua masyarakat diantaranya kami informasikan siapa yang akan diusung oleh partai.”

Menurut informan, DPC PDIP melaksanakan sosialisasi politik, dengan memberikan informasi politik kepada masyarakat, kegiatan sosialisasi politik bersama masyarakat ini dilaksanakan disetiap titik pertemuan di wilayah Kota Kupang, (*lihat gambar 5 hal 108*) dan informasi tidak langsung melalui media politik berupa baliho, spanduk, selebaran yang dipajang di jalan raya, dalam pelaksanaan sosialisasi politik, (*lihat gambar 6 hal 108*)

b. Mendidik masyarakat.

Hasil wawancara peneliti dengan R2 (54 tahun) pada hari Senin, 24 April 2017 pukul 14.00 Wita di Ruang Ketua DPRD Kota Kupang mengatakan bahwa: *“Kami partai PDIP membuka ruang secara umum bagi siapa saja, melalui pintu PDIP yang mau bergabung bersama kami, yang merasa pantas dan layak memimpin Kota Kupang dan akan diseleksi sesuai mekanisme PDIP.”*

Menurut informan, proses ini dilalui melalui tiga tahap, yakni penjangkaran, penyaringan dan penetapan. Dalam proses rekrut politik Calon kepala daerah tahun 2017 yang lalu, DPC PDIP membuka pendaftaran untuk calon kepala daerah yang ingin maju melalui pintu PDIP pada hari Rabu 10 Februari 2016. Pendaftaran dibuka selama 2 minggu dari tanggal 10 Februari sampai tanggal 24 Februari mendatang, nama-nama tersebut dijaring selama penerimaan, kemudian diserahkan pada pihak DPD PDI-P Provinsi setelah itu nama-nama kandidat akan disekolahkan pada sekolah kader PDIP, selama 3 bulan dan usai sekolah nama-nama itu akan dikembalikan lagi kepada DPC PDI-P Kota Kupang dan selanjutnya akan dilakukan survey untuk mencari tahu tingkat elektabilitas para kandidat di tengah masyarakat, dan setelah itu akan ditentukan nama dengan elektabilitas tertinggi kemudian disusul dengan rapat kerja cabang khusus (Rakercabsus) untuk menentukan salah satu nama dari kandidat yang bakal diusung oleh PDI-P dalam pemilihan walikota tahun 2017, (*lihat gambar*).

Hasil wawancara peneliti dengan anggota Legislatif yang dilahirkan oleh DPC PDIP selama 2 periode dari tahun 2009 hingga saat ini yakni RI (53 tahun) pada hari Senin, 24 April 2017 pukul 09.00 Wita di Ruangan Fraksi PDIP mengatakan bahwa: *“Saya menjadi anggota legislatif dari tahun 2009 hingga kini sudah dua periode masa jabatan saya, begitu banyak tahapan yang saya lalui, kami diseleksi sesuai dengan mekanisme yang ada, PDIP ini membuka pintu secara umum bagi siapa saja asalkan memenuhi persyaratan secara administratif yang ditentukan oleh undang-undang”*

Menurut informan, perjuangan seorang legislator sangatlah tidak mudah, dirinya harus melakukan pendaftaran melalui pintu PDI-P membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian ia melakukan proses penjangkaran dari awal sampai akhir dan mengikuti proses sesuai mekanisme, dan ketika namanya keluar ia mengatakan siap maju dalam pemilihan legislatif. Dalam jejak perjalanannya kader PDIP diharuskan mengikuti pelatihan dan pengkaderan sehingga pengetahuan berpolitikannya baik. Salah satu pelatihan yaitu dengan tema (Perencanaan penganggaran responsive gender) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2016 di Jakarta Pusat. Menurut informan, dirinya terpilih dalam periode kedua itu karena kedekatannya dengan masyarakat dengan menjadi aktivis rohani dan membuat kegiatan yang menciptakan kebersamaan bersama masyarakat seperti mengadakan lomba memancing ikan.



Gambar 1. DPRD Fraksi PDIP menyelenggarakan lomba memancing Ikan di Pantai Pasir Panjang sebagai wujud kebersamaan bersama masyarakat.

Pengalaman yang berbeda seperti wawancara peneliti dengan R5 pada Hari Senin, 24 April 2017 pukul 09.00 Wita di Ruang Fraksi PDIP mengatakan bahwa:

“Bapak awalnya hanya supir truck dengan latar belakang pendidikan saya paket C, tetapi saya bersyukur terpilih dari dapil alak, masa bakti tahun 2014-2019 seleksinya memang ketat tetapi saya dipilih dari partai karena loyalitas saya terhadap partai saya bekerja untuk partai artinya relawan partai sudah sejak tahun 1997 karena orang yang masuk dalam PDIP ini adalah orang sudah pernah terlibat organisasi partai,”

Menurut informan, dirinya hanya memiliki latar belakang pendidikan sebatas sekolah SMA sederajat/paket C, dan awalnya hanya berprofesi sebagai supir truck, tetapi karena ia dipercaya atau terpilih oleh masyarakat Kota Kupang, ia akan mengemban dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.

c. Menyediakan diri sebagai platform

Hasil wawancara peneliti dengan R3 (48 tahun) pada Hari Rabu, 29 Maret 2017 pukul 15.00 Wita di sekretariat DPC PDIP mengatakan bahwa:

“Kami mempunyai PAC dan AR disana tugas mereka adalah menampung aspirasi dari masyarakat, ada juga yang dikenal dengan masa reses itu tugas teman kami sebagai anggota legislatif turun ke dapil-dapil untuk menyerap aspirasi masyarakat”

Menurut informan, tindakan pertama yang dilakukan adalah Melakukan kegiatan artikulasi kepentingan yang dimulai dengan mendengarkan aspirasi masyarakat yang kemudian disampaikan kepada internal partai melalui kader partai yang duduk di DPRD untuk membahas dan menyetujuinya, kemudian kebijakan itu disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada rakyat oleh partai untuk diketahui, ditanggapi, dan dilaksanakan (*lihat gambar 10 hal 112*)

d. Membuat publikasi.

Hasil wawancara peneliti dengan R4 (49 tahun) pada hari Kamis, 30 Maret 2017 pukul 13.00 Wita di sekretariat DPC PDIP mengatakan bahwa: *“Aspirasi masyarakat yang digarab oleh teman kami di kursi anggota legislatif itu kami masukan kedalam program partai untuk kami perjuangkan menjadi suatu kebijakan umum atau menjadi undang-undang”*

Menurut informan, dalam proses agregasi kepentingan, aspirasi masyarakat tersebut dibahas, diolah, dan dirumuskan menjadi peraturan yang mengikat seperti undang-undang. Dalam proses itu terjadi arus komunikasi timbal balik antara rakyat dan pengambil keputusan politik melalui partai politik, kemudian kebijakan tersebut disosialisasikan, dan dikomunikasikan kepada rakyat oleh partai politik untuk diketahui, ditanggapi dan dilaksanakan.

Adapun studi dokumen yang diperoleh peneliti bahwa DPC PDIP menyerap aspirasi masyarakat kemudian membahas bersama Kepala Daerah. Dalam proses ini, informan mengaku proses tersebut sangat dibutuhkan power untuk diperjuangkan di depan pemerintah untuk itu kekuatan anggota partai haruslah kuat.



Gambar 2. Penyerahan dokumen laporan hasil reses anggota DPRD Kota Kupang tahun 2014 berupa aspirasi tuntutan masyarakat.

2. Tantangan dan hambatan DPC PDI-P dalam melaksanakan fungsi komunikasi politik.

a. Pendanaan.

Hasil wawancara peneliti dengan R3 (48 tahun) pada hari Rabu, 29 Maret 2017 pukul 15.00 Wita di sekretariat DPC PDI-P mengatakan bahwa:

“Sejauh ini pengurus partai dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi politik, maupun kampanye bersama masyarakat, semuanya menggunakan biaya, biaya yang diberikan dari pusat itu sekitar seratus juta per tahun nah kalau digunakan untuk kegiatan sosialisasi hanya dua kali kegiatan dalam setahun dananya sudah habis.”

Pendapat informan di atas sejalan dengan hasil dokumentasi peneliti bahwa pendanaan untuk partai setiap tahunnya sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dianggarkan untuk sarana dan prasana kantor, yakni biaya sewa gedung DPC PDI-P Kota Kupang, alat perlengkapan kantor, jaringan wifi, dan gaji penjaga gedung dan lain-lain.

b. Rekayasa media massa.

Hasil wawancara peneliti dengan R5 pada hari Rabu, 3 Mei-2017 pukul 09.00 di gedung DPRD Kota Kupang selaku (anggota DPRD Kota Kupang periode 2014-2019) mengatakan bahwa:

“Tantangan kami dalam membangun komunikasi bersama masyarakat salah satunya adalah membangun citra partai kami dimata masyarakat, saya selaku anggota legislatif dapil Kecamatan Alak, pernah terlibat masalah dengan media massa mengenai nama baik saya, saya sempat dimaki oleh masyarakat oleh perbuatan yang sebenarnya tidak saya lakukan yaitu saya dituduh menerima uang suap dari tempat karaoke sebesar Rp. 150.000.000, sempat buming waktu itu karena berita tersebar dalam berbagai media massa dan sumbernya dari salah satu wartawan media Victori news, nah masyarakat ini kan cepat sekali terpengaruh oleh media”

Menurut informan media massa selain memberikan manfaat positif bagi partai juga membawa manfaat negatif yakni citra partai dengan demikian media merupakan salah satu tantangan bagi partai dalam membentuk citra partai, apa yang disampaikan oleh media tidak sesuai fakta

atau realitas yang sebenarnya, namun masyarakat atau khalayak cenderung menerima begitu saja karena tertipu oleh pulasan yang disajikan oleh media massa.

c. Budaya Instan.

Budaya instan menjadi tantangan buat partai sendiri. Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan R3 pada hari Rabu, 29 Maret 2017 pukul: 13.00 Wita anggota DPC PDIP Kota Kupang mengatakan bahwa:

"Partai politik ini sudah bayak di negara ini, perilaku dari partai lain membawa dampak bagi partai lain juga, nah kita lihat sekarang Masyarakat Kota Kupang ini, tidak datang memberikan hak suara jika tidak diberi uang oleh kandidat yang mewakili partai dan untuk membuktikan kandidat siapa yang melakukan itu sangat sulit

Menurut informan, berkembangnya budaya instan membuat masyarakat tidak pandai dalam memilih, memilah partai yang diinginkan akhirnya kesalahan yang dibuat oleh kandidat partai mengakibatkan meningkatnya angka golput menjadi tantangan sendiri buat partai dan untuk membuktikan siapa yang melakukannya juga sangat sulit.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam melaksanakan fungsi komunikasi politik.

a. Menarik iuran.

Hasil penelitian menyatakan bahwa, untuk menambah dana operasional partai DPC PDIP menarik iuran dari anggota legislatif sebesar 30% dari gaji pokok sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Hasil wawancara peneliti dengan R3 pada hari Rabu, 29 Maret 2017 pukul. 13.00 mengatakan bahwa: "Untuk menambah biaya partai kami menarik angsuran 30% dari gaji pokok anggota DPRD yang berjumlah Rp. 17.000.000, (Tujuh belas juta rupiah) per bulannya" Menurut informan, dengan penarikan iuran tersebut juga belum mampu menutupi kekurangan dana operasional partai. Dirinya mengaku semuanya serba uang artinya pembentukan suatu kegiatan semuanya dibagikan uang sebagai panitia.

b. Pendekatan personal.

Menciptakan kebersamaan dengan memahami masyarakat merupakan upaya DPC PDIP dalam menjaga relasi citra partai di depan masyarakat, hasil wawancara peneliti dengan R1 pada hari Kamis, 20-April 2017 mengatakan bahwa: *"Saya tetap menjalin hubungan erat dengan masyarakat sebagai bentuk kebersamaan kami bersama masyarakat kami membuat kegiatan kecil-kecilan yang melibatkan masyarakat seperti bentuk refreasing kita."*

Menurut informan, kegiatan ini merupakan usaha partai dalam mendekati diri bersama masyarakat untuk membentuk citra partai di tengah masyarakat. Adapun studi dokumen yang diperoleh peneliti bahwa DPC PDIP menyelenggarakan kegiatan "Lomba memancing bersama anggota legislatif pada tanggal 20 Maret 2017 di pantai pasir panjang Kota Kupang.

SIMPULAN.

- 1) Pelaksanaan fungsi komunikasi politik DPC PDI-P yaitu memberikan informasi politik kepada masyarakat, mendidik masyarakat, membuat publikasi, dan sebagai saluran advokasi sudah dilaksanakan oleh partai, tetapi belum dilaksanakan secara maksimal. Di antaranya partai belum memaksimalkan pendidikan politik melalui sosialisasi politik yang efektif bagi masyarakat.
- 2) Hambatan yang dialami partai dalam melaksanakan komunikasi politik adalah pendanaan dalam setiap kegiatan membutuhkan pembiayaan, misalnya sosialisasi politik, selain itu media massa juga mempengaruhi citra kandidat maupun partai, serta budaya

instan yang mengakibatkan minimnya partisipasi politik masyarakat dalam membangun demokrasi.

- 3) Upaya yang dilakukan oleh DPC PDI-P dalam melaksanakan fungsi komunikasi politik dalam membangun masyarakat madani di antaranya adalah menarik iuran dari setiap anggota legislatif dan membangun kebersamaan bersama masyarakat.
- 4) Pelaksanaan fungsi komunikasi politik yang efektif dan efisien dapat memberi pendidikan politik bagi masyarakat serta kontribusi bagi negara dalam membangun masyarakat madani.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, A. C. (2002). *Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang Dan Melakukan. Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya
- Muda, Ahmad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta : 2006
- Arifin, Anwar. 2011. *Komunikasi Politik Filsafat – Paradigma- Teori- Strategi Dan Komunikasi Politik Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Arifin, Anwar. 2003. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Balai Pustaka
- Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- _____. 2000. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Indonesia
- _____. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama
- _____. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama
- Bahmuller, C. F. 1997. A Framework For Teaching Deocratic Citizenship: An International Project In The International Journal Of Social Education, 12
- Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, Dan Strategi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Diamond, M. Lisa, Aspinwall, G. Lisa. 2003. *Emotion Regulation Across The Lif Span: An Integrative Perspective Emphasizing Self-Regulation, Positive Affect, And Dyadic Processes. Motivation And Emotion*, Vol 27, No. 2
- Dahlan, Nasution . 1991. *Politik Internasional: Konsep Dan Teori*. Jakarta: Erlangga
- Dahlan, M. Awi, 1990. *Perkembangan komunikasi politik sebagai bidang kajian dalam Jurnal Ilmu Politik Jakarta: PT Gramedia*
- Firmanzah. 2011. *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor
- Fajar Nurul. (2011). *Model pendidikan kewarganegaraan*. Jurnal Vol 16 No. 1 Universitas Muhamadiyah Purwokerto.
- Gaffar, Afan. 2005. *Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2006. *Politik Indonesia (Transisi Menuju Demokrasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hikmat, Mahi. 2010. *Komunikasi Politik (Teori Dan Praktik Dalam Pilkada Langsung)*, Bandung: Remaja Rosdakarya Bandung
- Hadzuka Irvan. 2014. Peran dan Tanggung jawab Keluarga dalam Membentuk Masyarakat Madani. *Artikel Perahu Jagat*. <http://perahujagat.blogspot.co.id/2014/10/peran-dan-tanggung-jawab-keluarga-dalam.html>. 18/01/2017
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bansa*, Jakarta : Sekretarisat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008.
- Hermawan, Candra Iyep. (2010). *Modal Historis Pendidikan*. Jurnal Vol 15 No.11 tahun 2010. Universitas Suryakencana Cianjur. Hal 49
- Madjid, Nurcholish 1997, *Masyarakat Religius*, Paramadina, Jakarta
- Maarif, Ahmad Syafii. 2004. *Mencari Autensitas Dalam Kegaulan*. Jakarta: PSPA
- Moleong, J Lexy. 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya
- Miles, Matthew Dan Huberman, A. Michael. (2007). *Analisis Data Kuantitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta : UI Press.
- Michels, Roberts. 1984. *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis Dalam Birokrasi* Jakarta: Rajawali
- Muda, Ahmad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: 2006

- Nimmo, Dan. 2004. *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek, Pengantar Jalaludin Rakhmat*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya:Bandung
- _____.2005. *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan, Dan Media* Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rush, Michael & Althoff, Phillip. 2008. *Pengantar Sosiologi Politik* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Dawam. (1999). *Pengantar Sosiologi Pedesaan Dan Pertanian*. Gadjah Mada University Press.
- Seligman, Adam B. 1992. *The Idea Of Civil Society*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik* . Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia
- _____.1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Salim, Agus. (2001). *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta:Tiara Wacana
- Trycahyono, Ibnu. 2009. *ReformasiPemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal*. Malang : In Trans Publishing
- Uchjana Effendy. 2007. *Ilmu Komunikasi (Teori Dan Praktek)*Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Castells (2007). *“Communication, Power And Counter-Power In The Network Society”* .Universitas Oxford
- Kurniasih, Dewi. (2014).” *Pelaksanaan Fungsi Komunikasi Politik Partai Demokrat” (Studi Pemilihan Walikota Bandung 2013)*. Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Komputer Indonesia)
- Maaratong, Jenly.(2012). *Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik (Suatu Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud)*. Jurusan Ilmu Pemerintahan , Program Studi Ilmu Politik FISIP USTRAD.
- Lestari, Wiwin. (2015) *“Wacana Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)Sebagai Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 Di Yogyakarta”* Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Tagatorop, Primadani (2016) *Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Menjalankan Fungsi Komunikasi Politik Di Kabupaten Dairi*. Undergraduate Thesis, UNIMED
- Utomo Satrio Ridho 2014. *Strategi Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Memobilisasi Pemilih Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kota Semarang*. Tesis. Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro